

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

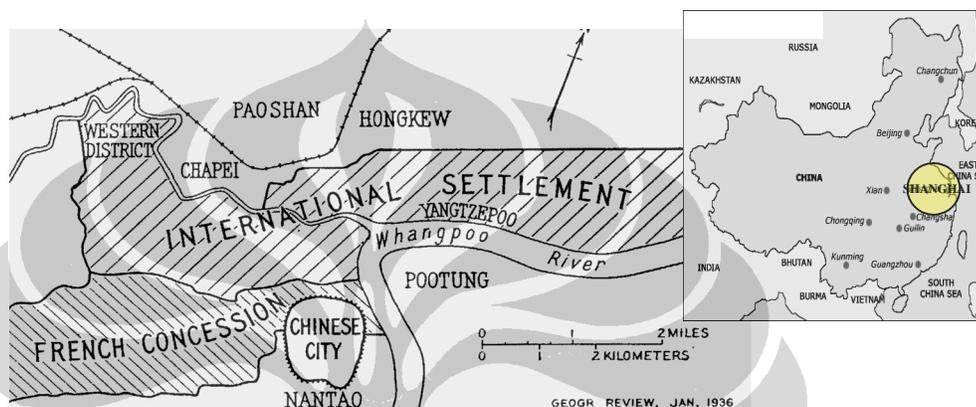
Perang Candu (yāpiàn zhànzhēng 鸦片战争)¹ yang berakhir pada tahun 1842 ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Nanjing (nánjīng tiáoyuē 南京条约). Dalam perjanjian yang terdiri dari dua belas pasal ini, Shanghai (上海) dan empat propinsi lain di Cina (Guangzhou 广州, Fuzhou 福州, Xiamen 厦门, dan Ningbo 宁波) dibuka untuk perdagangan internasional (Spence, 1990: 158-159). Melalui perjanjian Nanjing, orang Inggris diperbolehkan untuk tinggal di lima propinsi tersebut. Selain itu, perjanjian Humen (hǔmén tiáoyuē 虎门条约) antara Cina dan Inggris pada tahun 1843 dan perjanjian Wangxia (wàngxià tiáoyuē 望厦条约) antara Cina dan Amerika pada tahun 1844 merupakan awal penyebab timbulnya kekuasaan ekstrateritorial (zhìwài fǎquán 治外法权) bangsa asing terhadap Cina. Hal ini secara bertahap membentuk apa yang disebut sebagai “guó zhōng zhī guó 国中之国” (negara di dalam negara) (Wáng Wénquán 王文泉 & Liú Tiānlù 刘天路, 2001: 12-14).

Kekuasaan ekstrateritorial inilah yang membuat Shanghai terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu pemukiman internasional (Shànghǎi gōnggòng zūjiè 上海公共租界), wilayah konsesi Prancis (Shànghǎi fǎzūjiè 上海法租界), dan kotapraja Cina (Hsü Shushi, 1938: 1-2). Ketiga wilayah ini memiliki yuridiksi yang berbeda dengan administrasi politik yang berbeda-beda pula. Wilayah milik orang Cina yang dipimpin oleh pemerintah kota Cina terletak mengelilingi pemukiman internasional dan area konsesi Prancis. Wilayah ini juga mencakup Pudong (浦东), yaitu area yang cukup luas di sebelah kanan sungai Huangpu (Huángpǔ hé 黄浦江). Wilayah orang Cina jauh lebih luas dari kedua wilayah konsesi dan jumlah penduduknya kira-kira sama dengan total penduduk di wilayah konsesi asing.

¹ Perang Candu terjadi pada tahun 1839-1840 antara Cina dengan Inggris. Penyebab utama perang ini karena Lin Zexu, pejabat Guangdong saat itu, mengadakan pembakaran besar-besaran terhadap candu milik Inggris di Guangdong, tetapi perdagangan candu tetap berjalan. Akhirnya, terjadilah perang antara Cina dan Inggris pada tahun 1840 (Spence, 1990: 152-158).

Selain itu, wilayah orang Cina yang memiliki luas 320 mil persegi ini, bersifat pedesaan dan pertanian (Jones, 1940: 25). Di sisi lain, pemukiman internasional dan wilayah konsesi Prancis merupakan area terpenting berlangsungnya kegiatan ekonomi modern di Shanghai (Shen Tsen-Kwan, *The China Weekly Review*, 24 Nov. 1928).

Gambar 1.1 Peta Shanghai



Sumber: John E. Orchard "Shanghai." *Geographical Review* (1936). 21 April 2009 02:01 <http://www.jstor.org/stable/209460> hal. 28 (telah diolah kembali)

Tabel 1.1 Wilayah Konsesi Asing di Shanghai

| Wilayah Yuridiksi | Dipimpin Oleh | Luas Wilayah | Letak | Jumlah penduduk (tahun 1929) | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--|------------------------------|---------|
| | | | | Asing | Cina |
| Pemukiman Internasional | Dewan Kotapraja Shanghai | 8.94 mil persegi | Terletak di sebelah utara dan selatan sungai Huangpu | 30.565 | 802.700 |
| Wilayah Konsesi Prancis | Dewan Kotapraja Prancis | 3.95 mil persegi | Terletak di sebelah selatan pemukiman Internasional | 9.920 | 348.076 |

Sumber: Eleanor M. Hinder, *Social and Industrial Problems of Shanghai*. (New York, 1942), hal. 1-3 (telah diolah kembali)

Shanghai menjadi fokus utama dalam penelitian skripsi ini karena posisinya yang dominan di seluruh sektor ekonomi modern, yang meliputi perdagangan, perindustrian, dan perbankan. Dengan posisi Shanghai yang strategis sebagai pelabuhan laut utama di lembah sungai Yangzi (Chángjiāng 长江), para pedagang, industrialis, dan bankir Shanghai memperoleh keuntungan yang luar biasa. Antara tahun 1927-1931, misalnya, 43 % dari perdagangan luar negeri Cina melalui kota ini. Sedangkan pada tahun 1933-1934, Shanghai

menangani rata-rata 54 % dari total perdagangan luar negeri Cina. Pada sektor industri, Shanghai patut diperhitungkan karena jumlah total investasinya di bidang manufaktur modern dan kekuatan buruh industrinya. Dari 133 pabrik tenun dan pemintalan kapas yang ada di Cina, 61 di antaranya berada di Shanghai (Orchard, 1936: 2-3). Di bidang perbankan, 26 bank yang menjadi anggota Asosiasi Bankir Shanghai memiliki sekitar tiga perempat dari keseluruhan sumber daya yang dimiliki bank Cina modern (Coble, 1980: 135). Sudah jelas bahwa Shanghai merupakan pusat dari sektor ekonomi modern Cina dan pengusaha Shanghai tentu saja menjadi kelompok ekonomi terkuat di Cina. Sebelum tahun 1927, para pengusaha Shanghai tidak hanya aktif dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga telah aktif dalam bidang politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai asosiasi, seperti Kamar Dagang Shanghai (Shànghǎi Zǒng Shānghuì 上海总商会), Asosiasi Bankir Shanghai (Shànghǎi Yínháng Tóngyè Gōnghuì 上海银行同业工会), dan Federasi Perhimpunan Dunia Perdagangan Shanghai (Shànghǎi Gèlù Shāngjiè Zǒng Liánhéhuì 上海各路商界总联合会).

Pada tahun 1926, basis Kuomintang (Guómíndǎng 国民党) berada di Guangzhou (广州), sedangkan wilayah Cina yang lain masih dikendalikan oleh *warlord* (jūnfá 军阀). Ekspedisi ke Utara (Běifá 北伐) yang dirancang oleh Kuomintang merupakan kampanye militer yang bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai *warlord* di utara. Sebanyak 50000 tentara nasionalis berangkat dari Guangzhou menuju utara. Wilayah *warlord* di bagian tengah Cina merupakan sasaran yang pertama. Dengan bantuan dari wilayah pedesaan, tentara nasionalis berhasil merebut wilayah-wilayah tersebut pada bulan Agustus. Oleh karena itu, pada bulan Januari 1927, Komite Sentral Kuomintang (Guómíndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì 国民党中央委员会) memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah yang berada lebih ke utara. Keputusan ini menyebabkan konflik antara Chiang Kai-shek (Jiǎng Jièshí 蒋介石) dan Kuomintang sayap kanan dengan Komunis. Chiang lebih memilih memindahkan ibu kota yang baru ke Nanchang (南昌), propinsi Jiangxi (江西). Di sisi lain, Kuomintang sayap kiri dan Komunis lebih memilih ibu kota dipindahkan ke Wuhan (武汉). Komunis dan

sekutunya menentang keinginan Chiang dan memindahkan pemerintahan ke Wuhan.

Sejak saat itu, Chiang sebagai komandan utama tentara nasionalis mulai bergerak secara independen. Chiang Kai-shek dengan dukungan dari Kuomintang sayap kanan kemudian berencana untuk menguasai wilayah-wilayah yang strategis di lembah sungai Yangzi. Pada bulan Agustus 1927 Shanghai dikuasai oleh tentara nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Pada minggu yang sama, Nanjing juga dikuasai oleh tentara nasionalis. Dengan kekuasaan atas Shanghai dan Nanjing, Chiang dengan kekuatan militernya mampu untuk menghentikan komunis dan memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 12 April 1927, Chiang melakukan teror putih, yaitu pembantaian terhadap anggota komunis beserta organisasi-organisasinya. Kemudian pada tanggal 18 April, Chiang mendirikan pemerintahan di Nanjing. Pemerintahan inilah yang disebut sebagai Pemerintah Nanjing.

Sejak tahun 1980-an, para sejarawan, baik sejarawan Cina maupun sejarawan barat, mulai semakin intensif meneliti tentang permasalahan hubungan antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing ini. Namun, kesimpulan yang diperoleh keduanya sangat bertolak belakang. Pada prinsipnya, sejarawan Cina umumnya lebih menekankan adanya kompromi dan keselarasan kepentingan di antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Sebaliknya, sejarawan barat lebih memperhatikan adanya konflik dan pertentangan di antara keduanya (Wáng Qíshēng 王奇生, 2009:1). Perbedaan kesimpulan ini menunjukkan adanya sifat kompleks dari masalah ini.

Salah satu sejarawan Cina, Chen Boda, menyatakan bahwa pengusaha Shanghai memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah Nanjing. Pengusaha Shanghai juga dapat memberikan pengaruh politik yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Selain itu, kebijakan pemerintah Nanjing dianggap mewakili keinginan pengusaha Shanghai. Hal ini sesuai pernyataan yang tertulis dalam buku yang berjudul *Notes on Ten Years of Civil War*:

Rezim dari warlord yang baru adalah sebuah kediktatoran militer kontrarevolusioner² dari komprador dan tuan tanah besar. Rezim itu dibentuk oleh komprador-pemodal Shanghai, atau "Kiangsu-Chekiang" ... sebagai pusatnya. Mereka muncul dalam panggung politik dan menjadi tokoh penting dalam partai dan pemerintahan, mengatur masalah politik dan keuangan negara (Chen Po-ta, 1954: 6)

Hé gàn (何幹) dalam buku yang berjudul *Zhōngguó Xiàndài Géming shǐ* 中国现代革命史 (Sejarah Revolusi Modern Cina), juga menegaskan hal yang sama. Ia mengemukakan bahwa pemerintah Nanjing dibentuk oleh "kekuasaan komprador Zhejiang-Jiangsu [pengusaha Shanghai] sebagai pusatnya". Bahkan, ia menyatakan bahwa "Chiang Kai-shek mewakili kepentingan kelas komprador [pengusaha Shanghai]" (1957: 119). Selain itu, Akira Nagano dalam bukunya yang berjudul *Development of Capitalism in China* juga mengemukakan hal yang serupa: "Pengaruh kapitalis di Shanghai dan kota-kota besar lainnya dewasa ini telah berkembang pesat. Pemerintah pusat tidak akan ada tanpa memperoleh pengaruh ini, dan ... [para] kapitalis mengendalikan kebijakan pemerintah" (Coble, 1980: 2).

Sebaliknya, Lloyd Eastman dalam bukunya yang berjudul *The Abortive Revolution: China Under Nationalist Rule 1927-1937*, mengemukakan hal yang bertolak belakang dengan kedua pernyataan di atas:

Ketika agen-agen Kuomintang melakukan pemerasan secara terbuka dan menculik kelas-kelas pedagang, ketika kebijakan dari rezim jelas-jelas dilakukan untuk merugikan pengusaha swasta, ketika perusahaan-perusahaan milik negara bersaing dengan modal swasta, maka harus disimpulkan bahwa kepentingan ekonomi urban tidak secara signifikan mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan Pemerintah Nanking. (Fewsmith, 1985: 115)

Fairbank menegaskan pernyataan Eastman di atas dengan menulis demikian dalam bukunya yang berjudul *China A New History*: "... Pemerintah Nanjing

² Mao Zedong menggambarkan pemerintahan Kuomintang saat itu (pemerintah Nanjing) sebagai pemerintahan warlord yang baru dengan kediktatoran militer kontrarevolusioner. Disebut sebagai pemerintah warlord yang baru karena pemerintah ini dipimpin oleh warlord Kuomintang jenis baru, bukan lagi oleh warlord di utara yang lama. Sedangkan, kediktatoran militer kontrarevolusioner mengacu pada tindakan militer Chiang Kai-shek yang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap komunis dan para buruh di Shanghai pada tanggal 12 April 1927 (Chen Po-ta, 1954:4).

bukan ada untuk mewakili kepentingan borjuis melainkan untuk lebih memperkuat kekuatannya sendiri ...” (Fairbank and Goldman, 2006: 288-289)

Berdasarkan kontradiksi pernyataan-pernyataan di atas, penulis tertarik membahas lebih mendalam bagaimana sebenarnya hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Apakah pengusaha Shanghai benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah Nanjing sehingga dapat menentukan kebijakan pemerintah Nanjing, khususnya pada tahun 1927-1933. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa pada tahun 1927-1933, pemerintah Nanjing menggunakan pengusaha Shanghai untuk mendanai kebutuhan militer pemerintah saja dan bukan untuk kemakmuran pengusaha Shanghai. Pemerintah Nanjing juga tidak mepedulikan pendapat pengusaha Shanghai yang disampaikan dalam berbagai konferensi pada tahun 1927-1933. Pendapat pengusaha Shanghai tersebut antara lain berkaitan dengan masalah pembatasan anggaran militer, penurunan tingkat pajak, serta perwakilan mereka dalam partai. Selain itu, pemerintah juga berusaha mengendalikan dan membubarkan asosiasi milik pengusaha Shanghai (Fewsmith, 1985: 113-116; Spence, 1990: 361-362; Coble, 1980: 2-3). Jadi, beberapa sumber tersebut menyimpulkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memiliki peran politik yang signifikan terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Ketika Ekspedisi ke Utara dilaksanakan pada bulan Juli 1926, muncul tiga macam revolusi di Cina, yaitu revolusi politik, revolusi anti imperialisme, dan revolusi sosial. Revolusi politik bertujuan untuk menumpas *warlord* dan menciptakan pemerintah nasional yang dapat mengendalikan seluruh pemerintah lokal beserta kekuatan militernya. Revolusi anti imperialisme bertujuan untuk menghapuskan hak-hak khusus yang dimiliki orang asing di Cina dan menghapuskan diskriminasi ras yang terjadi di wilayah *treaty port*³. Sedangkan pada revolusi sosial, petani dan buruh industri membentuk Gerakan Revolusioner Buruh dan Petani (Gōngnóng Géming Yùndòng 工农革命运动) yang bertujuan untuk mendukung Ekspedisi ke Utara. Gerakan massa yang dipimpin oleh orang-

³ Dalam perjanjian Nanjing antara Cina dan Inggris, disepakati untuk membuka pelabuhan-pelabuhan yang ada di Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Ningbo, dan Shanghai bagi perdagangan internasional (*wū gè tōngshāng kǒu'àn* 五个通商口岸). Kelima wilayah pelabuhan inilah yang disebut sebagai *treaty port*.

orang dari sayap kiri Kuomintang ini semakin radikal dan membuat takut banyak pihak di dalam tubuh Kuomintang. Hal ini membuat Kuomintang terpecah belah dan yang menentang revolusi sosial serta takut jika komunis menguasai partai, bergabung dengan Chiang Kai-shek mendirikan pemerintahan di Nanjing (Grasso, Corrin, and Kort, 2004: 93-96).

Peristiwa yang terjadi pada tahun 1927 ini memperlihatkan bagaimana karakter dari pemerintahan Nanjing. Keberhasilan Chiang Kai-shek dalam menumpas komunis belumlah sempurna. Pendukung komunis mundur dan bersembunyi di pedesaan. Di pedesaan inilah mereka mendapatkan banyak dukungan. Chiang sangat terobsesi untuk menghapuskan ancaman ini sehingga perang sipil sering terjadi selama masa pemerintahan Nanjing (Lary, 2007: 97-99). Perlawanan pemerintah Nanjing terhadap revolusi sosial dan gerakan massa membuat jurang pemisah yang besar antara pemerintah Nanjing dan para petani. Pemerintah Nanjing jarang menetapkan program yang menguntungkan bagi para petani. Hal ini dapat dilihat melalui persentase tertinggi dari anggaran nasional yang ditujukan untuk pengembangan pertanian yang hanya mencapai 3.7 % saja. Oleh karena itu, Pemerintah Nanjing tidak pernah memiliki pengaruh yang kuat di pedesaan. Wilayah yang benar-benar berada di bawah kendali Kuomintang adalah wilayah perkotaan. Dalam hal keuangan, hampir sebagian besar dari pemasukan pemerintah Nanjing berasal dari sektor ekonomi modern di perkotaan. Tidak ada pemasukan yang signifikan dari pedesaan (Grasso, Corrin, and Kort, 2004: 105-106).

Pada tahun 1927, sikap anti imperialisme yang dijalankan oleh Kuomintang semakin menurun. Bahkan, Kuomintang menjalankan kebijakan kerja sama dengan pihak asing untuk mencegah konfrontasi. Hal ini terlihat ketika Jepang menduduki Shenyang (沈阳) pada tanggal 18 September 1931. Chiang Kai-shek malahan memerintahkan tentaranya untuk mundur. Selain itu, dalam menetapkan tingkat pajak untuk barang manufaktur, Kuomintang sangat dipengaruhi oleh pihak asing dalam menetapkan kebijakan ini. (Coble, 1980: 6-7).

Kebijakan Pemerintahan Nanjing juga ditentukan oleh Chiang Kai-shek. Tokoh-tokoh partai seperti Sun Ke (孙科), Wang Jingwei (汪精卫), dan Hu

Hanmin (胡汉民) merasa memiliki hak yang sama untuk berkuasa seperti Chiang. Sedangkan, tokoh-tokoh militer seperti Li Zongren (李宗仁), Bai Chongxi (白崇禧), Feng Yuxiang (冯玉祥), dan Zhang Xueliang (张学良) bersedia bergabung dalam partai Kuomintang, namun memimpin tentara yang independen⁴ dari Chiang maupun pemerintah Nanjing. Lawan-lawan politik dan militer ini kerap kali mengancam dominasi Chiang dalam Kuomintang. Untuk membuat para pesaingnya terpecah-belah, Chiang sering mengadakan aliansi dengan lawan politiknya, namun tetap segan untuk berbagi kekuasaan (Lary, 2007: 100-104). Hasilnya, konflik kerap terjadi antara Chiang dan lawan-lawannya. Dari bulan Agustus 1927 sampai tahun 1930, tercatat ada tujuh kali perang antara Chiang dengan tokoh-tokoh militer tersebut (Hé gàn 何幹, 1957: 118-119).

Pada masa pemerintahannya, Chiang juga secara bertahap memperluas wilayah kekuasaan pemerintah Nanjing baik ke selatan maupun ke barat. Usaha Chiang ini tentu saja memakan dana yang besar. Dana tersebut juga bertambah besar dengan adanya perang melawan komunis, perang yang menghabiskan tenaga dan keuangan pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah militer merupakan masalah yang menjadi prioritas utama dalam masa pemerintahan Nanjing (Grasso, Corrin, and Kort, 2004: 101).

Pengusaha Shanghai yang juga menentang revolusi sosial karena takut dengan gerakan radikal para buruh, mendukung Chiang untuk melakukan penindasan terhadap gerakan buruh. Aliansi antara pengusaha Shanghai dan Chiang Kai-shek ini seakan-akan 'menutupi' perselisihan yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Perselisihan ini disebabkan karena tiga aspek. Pertama, masalah uang menjadi penyebab utama perselisihan ini. Kampanye militer yang dilakukan Chiang menghabiskan dan membutuhkan banyak dana. Sedangkan, pemasukan pemerintah Nanjing hanya berasal dari sektor ekonomi modern yang sebagian besar terpusat di Shanghai. Tuntutan dana yang semakin besar yang melebihi

⁴ Seperti yang dikemukakan oleh Jendral He Yingqin (何应钦), kepala direktur Departemen Pelatihan Militer Kuomintang, para tokoh militer Kuomintang tersebut sering bertindak secara independen. Hal ini terlihat ketika mereka menunjuk, memberhentikan, dan memindahkan tentara sesuai keinginan mereka. Selain itu, mereka juga menempatkan dan mendistribusikan tentara di manapun tanpa mempedulikan instruksi dari pemerintah pusat. Mereka juga mengumpulkan uang untuk mendirikan sekolah militer tanpa seijin pemerintah pusat. Padahal semua hal yang berhubungan dengan militer seharusnya berada di bawah kendali pemerintah pusat (Hé Yingqin, *The China Critic*, 10 Jan. 1929).

kemampuan pengusaha Shanghai akhirnya memunculkan konflik di antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Faktor kedua adalah sikap pemerintah Nanjing terhadap pihak asing. Para pengusaha Shanghai merasa tersaingi dengan dominasi asing pada sektor ekonomi modern. Pengusaha, bankir, dan industrialis asing memiliki akses yang lebih baik terhadap modal dibandingkan dengan pengusaha lokal. Dalam hal pajak, tingkat pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Nanjing pada beberapa barang manufaktur lebih besar bagi industrialis Cina dibandingkan industrialis asing. Karena faktor ekstrateritorial, industri asing mempunyai kekuatan yang lebih besar ketika menegosiasikan tingkat pajak dengan pemerintah (Coble, 1980: 10-12).

Faktor ketiga adalah keinginan pengusaha Shanghai untuk mendapatkan kedudukan politik dalam partai. Pengusaha Shanghai sebelum tahun 1927 telah aktif dalam bidang ekonomi dan politik dan berharap dapat melanjutkan hal ini pada masa pemerintah Nanjing. Para pengusaha Shanghai menuntut adanya perwakilan mereka di dalam partai dan pengakuan resmi atas harta pribadi mereka. Oleh karena itu, asosiasi-asosiasi yang dimiliki pengusaha Shanghai seperti Kamar Dagang Shanghai dan asosiasi perbankan berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah melalui telegram dan petisi. Di sisi lain, Chiang tidak mempedulikan aspirasi politik mereka. Pengusaha Shanghai dianggap membahayakan karena peran mereka yang besar dalam mendanai pemerintah Nanjing. Oleh karena itu, Chiang berusaha mengendalikan pengusaha Shanghai di bawah kekuasaan pemerintah. Organisasi-organisasi milik pengusaha Shanghai dirombak, bahkan dibubarkan (Xu Xiaoqun, 2001: 97).

Walaupun demikian, Chiang menghadapi kesulitan dalam mengendalikan pengusaha Shanghai karena mereka sebagian besar berada di wilayah konsesi asing. Namun, Chiang melakukan aliansi dengan Gang Hijau (Qīngbāng 青幫), sebuah organisasi mafia Shanghai, untuk melakukan penindasan terhadap pengusaha Shanghai (Fewsmith, 1985: 113-114). Pernyataan bahwa pengusaha Shanghai beraliansi dekat dengan pemerintah Nanjing adalah tidak tepat. Selain persamaan kepentingan antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing dalam hal menentang revolusi sosial, hubungan di antara keduanya banyak

diwarnai oleh konflik. Selain itu, pengusaha Shanghai juga hanya memiliki peran yang kecil dalam kebijakan pemerintah Nanjing.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian berjudul Pengusaha Shanghai dan Pemerintah Nanjing (1927-1933) ini berusaha menjawab beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain bagaimana pengusaha Shanghai sebelum masa pemerintah Nanjing, yang meliputi sejarah perkembangan dan asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh pengusaha Shanghai. Selain itu, juga akan dibahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Lebih lanjut, permasalahan juga akan dibahas adalah apakah hubungan keduanya adalah hubungan yang saling menguntungkan dan ada ketergantungan di antara keduanya. Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Melalui kebijakan pemerintah Nanjing inilah dapat dilihat apakah pemerintah Nanjing membiarkan pengusaha Shanghai memiliki peran yang signifikan dalam bidang politik. Kebijakan ini tercermin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang terhadap asosiasi milik pengusaha Shanghai.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, skripsi ini juga akan menganalisa bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai menteri keuangan saat itu terhadap pengusaha Shanghai. Latar belakang dan karakter kedua tokoh ini sangat mempengaruhi hubungan antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Selanjutnya, akan dibahas pula bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain Konferensi Ekonomi Nasional, Konferensi Keuangan Nasional, Sidang Pleno ke-5 Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, Konferensi Pembatasan dan Reorganisasi Militer, Kongres Ketiga Partai Kuomintang, Pembubaran dan Reorganisasi Kamar Dagang Shanghai, Penjualan Surat Berharga Pemerintah, Penetapan Pajak-pajak Baru, serta Kampanye Anti Komunis dan Liga Anti Perang Sipil. Dari ketiga aspek

itulah akan disimpulkan bagaimana peran pengusaha Shanghai pada masa pemerintah Nanjing.

Pembahasan dalam skripsi ini hanya difokuskan pada tahun 1927-1933. Dalam buku yang berjudul *Zhōngguó Jīngjìshǐ* 中国经济史 (Sejarah Ekonomi Cina), disebutkan bahwa tahun 1927-1933 merupakan periode awal pembangunan (*Chūbù Jiànshè Shíqī* 初步建设时期) dari masa pemerintah Nanjing (Zhāng Kāiyuán 章开沅, 2002: 273). Lebih lanjut, tahun 1927 merupakan tahun dimulainya kekuasaan pemerintah Nanjing atas Shanghai dan tahun 1933 merupakan tahun berhentinya T.V Soong sebagai menteri keuangan pemerintah Nanjing. Selain itu, dalam kurun waktu yang singkat, yaitu 1927-1933, Cina mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Jadi, penulis beranggapan bahwa tahun 1927-1933 merupakan waktu yang cukup untuk melihat bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan serta memberikan suatu analisa secara objektif mengenai pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing, terutama bagaimana interaksi antara pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing pada tahun 1927-1933. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi mengenai sejarah Cina dan dapat menjadi pondasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing.

1.4 Metode Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah acuan ilmiah berupa buku-buku dan literatur dalam bentuk lainnya seperti majalah, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Penulisan skripsi ini juga bersifat deskripsi analisis, yaitu dengan menyusun dan mengumpulkan data serta menganalisa permasalahan dan

menyimpulkannya. Perlu juga disebutkan bahwa nama-nama atau istilah dalam bahasa Cina ditulis berdasarkan ejaan Hànyǔ pīnyīn (汉语拼音), yaitu ejaan yang telah diperbaharui dan digunakan secara resmi di RRC sejak tahun 1957. Untuk nama-nama seperti Chiang Kai-shek, T.V Soong, Sun Yat-sen, dan Kuomintang penulis tetap menggunakan ejaan tersebut karena dianggap lebih populer. Walaupun demikian, penulis tetap menyertakan ejaan hanyu pinyin dan hanzi dari nama-nama tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang pengusaha Shanghai sebelum masa pemerintah Nanjing, meliputi sejarah dan perkembangan pengusaha Shanghai yang terbagi ke dalam sektor perdagangan, perindustrian, dan perdagangan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai asosiasi-asosiasi yang dibentuk oleh pengusaha Shanghai sebelum masa pemerintah Nanjing.

BAB III membahas dan menganalisa pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing. Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kuomintang terhadap asosiasi milik pengusaha Shanghai. Kemudian, juga akan dibahas bagaimana kebijakan pemerintah Nanjing, dalam hal ini Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V. Soong sebagai menteri keuangan, terhadap pengusaha Shanghai. Selain itu, juga akan dibahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan analisa yang dibuat penulis berdasarkan hasil penelitian mengenai pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing mulai tahun 1927 sampai tahun 1933.